

# Keselarasan pancasila dan konstitusi di indonesia: menatap masa depan demokrasi indonesia di era digital

Difah Rimadhani

Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: difahro6@gmail.com

## Kata Kunci:

Pancasila, Konstitusi, Demokrasi Digital, Generasi Muda, Literasi Digital

## Keywords:

Pancasila, Constitution, Digital Democracy, Youth, and Digital Literacy

## ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital membawa banyak perubahan dalam sistem demokrasi di Indonesia. Kehadiran media sosial dan ruang digital membuka peluang partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam kehidupan politik, namun juga menimbulkan tantangan berupa penyebaran hoaks, polarisasi politik, ujaran kebencian, dan menurunnya etika demokrasi. Artikel ini bertujuan untuk membahas pentingnya keselarasan antara Pancasila dan konstitusi dalam menghadapi masa depan demokrasi Indonesia di era digital. Penulisan artikel ini menggunakan metode studi pustaka dengan mengambil referensi dari berbagai jurnal dan sumber yang membahas

demokrasi, Pancasila, dan konstitusi. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Pancasila memiliki peran penting sebagai dasar moral dan identitas nasional, sedangkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi landasan hukum dalam menjaga kehidupan demokrasi yang tertib dan berkeadilan. Selain itu, generasi muda dan pendidikan politik memiliki peran strategis dalam membangun demokrasi digital yang sehat dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, penguatan nilai-nilai Pancasila, kesadaran konstitusional, serta literasi digital menjadi langkah penting untuk menjaga kualitas demokrasi Indonesia di tengah perkembangan teknologi global.

## ABSTRACT

The development of digital technology has brought significant changes to Indonesia's democratic system. The presence of social media and digital spaces opens opportunities for broader public participation in political life, but it also creates challenges such as the spread of hoaxes, political polarization, hate speech, and the decline of democratic ethics. This article aims to discuss the importance of aligning Pancasila and the Constitution in facing the future of Indonesian democracy in the digital era. The writing of this article uses a literature study method, drawing references from various journals and sources that examine democracy, Pancasila, and the Constitution. The study shows that Pancasila is very important as a moral foundation and national identity, while the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia provides the legal basis to maintain an orderly and fair democracy. In addition, young people and political education play a key role in building a healthy and responsible digital democracy. Therefore, strengthening Pancasila values, constitutional awareness, and digital literacy are essential steps to protect the quality of Indonesia's democracy in the middle of global technological change.

## Pendahuluan

Demokrasi Indonesia terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Perubahan sosial, kemajuan teknologi, serta berkembangnya arus informasi global telah membawa pengaruh besar terhadap kehidupan politik dan kenegaraan di Indonesia. Di era digital saat ini, masyarakat dapat dengan mudah menyampaikan pendapat,



mengakses informasi, serta berpartisipasi dalam ruang publik melalui media sosial dan berbagai platform digital lainnya. Kondisi tersebut memberikan peluang besar bagi perkembangan demokrasi yang lebih terbuka dan partisipatif. Namun di sisi lain, perkembangan teknologi juga menghadirkan tantangan baru seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, polarisasi politik, hingga menurunnya kualitas etika dalam berdemokrasi. Untuk menghadapi tantangan tersebut, Indonesia membutuhkan dasar yang kuat agar demokrasi tetap berjalan sesuai dengan identitas bangsa. Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara menjadi fondasi utama dalam menjaga arah demokrasi Indonesia. Nilai-nilai Pancasila seperti persatuan, kemanusiaan, musyawarah, dan keadilan sosial harus tetap menjadi pedoman dalam kehidupan demokrasi, termasuk dalam ruang digital.

Menurut Nugroho, literasi digital yang rendah menjadi salah satu faktor utama melemahnya ketahanan demokrasi di Indonesia (Judijanto, 2026). Masyarakat yang tidak mampu memverifikasi informasi cenderung mudah terpengaruh hoaks dan propaganda politik, sehingga kualitas diskusi publik menurun. Oleh karena itu, penguatan literasi digital harus menjadi bagian integral dari penguatan demokrasi Pancasila. Keselarasan antara Pancasila dan konstitusi menjadi hal penting karena keduanya saling melengkapi dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila memberikan nilai moral dan filosofis, sedangkan konstitusi memberikan aturan hukum yang mengikat seluruh warga negara. Jika keduanya diterapkan secara harmonis, maka demokrasi Indonesia akan mampu menghadapi tantangan zaman tanpa kehilangan jati dirinya sebagai negara yang berlandaskan nilai luhur bangsa.

Selain itu, perkembangan demokrasi digital juga menuntut masyarakat untuk memiliki kesadaran politik dan tanggung jawab sosial yang lebih tinggi. Kebebasan berekspresi di media digital harus diimbangi dengan etika, penghormatan terhadap hukum, serta semangat persatuan nasional. Oleh karena itu, penguatan pendidikan kewarganegaraan, literasi digital, dan pemahaman terhadap konstitusi menjadi kebutuhan penting dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia di masa depan. Melalui artikel ini, penulis akan membahas bagaimana keselarasan antara Pancasila dan konstitusi dapat menjadi dasar dalam menghadapi masa depan demokrasi Indonesia di era digital. Pembahasan akan difokuskan pada landasan ideologi dan konstitusi, perspektif identitas dan kewarganegaraan, serta transformasi partisipasi masyarakat di era digital.

## Metode Penelitian

Penulisan artikel ini menggunakan metode studi pustaka dengan mengambil referensi dari berbagai jurnal ilmiah, buku, dan dokumen resmi pemerintah yang membahas demokrasi, Pancasila, konstitusi, dan literasi digital. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memahami hubungan antara nilai Pancasila, ketentuan konstitusional, dan tantangan demokrasi digital. Jenis penelitian yang digunakan adalah *deskriptif kualitatif*. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai hubungan antara nilai Pancasila, ketentuan konstitusional, dan tantangan demokrasi digital tanpa menggunakan data statistik, melainkan melalui analisis teks dan dokumen. Yang mana bersumber dari jurnal ilmiah (MIJ), Dokumen

resmi pemerintah, dan Buku. Maka dapat disimpulkan bahwa, metode ini bertujuan untuk memberikan landasan yang kuat untuk pembahasannya. Dimana metode ini memberikan petunjuk yang jelas antara nilai Pancasila, konstitusi, dan tantangan demokrasi digital. Dan bertujuan juga Menyusun kerangka analisis yang sistematis untuk menjawab permasalahan penelitian.

## **Pembahasan**

Pada bagian ini akan diuraikan Demokrasi Indonesia memiliki karakteristik unik karena berakar pada Pancasila dan UUD 1945 sebagai fondasi utama. Kedua landasan ini tidak hanya berfungsi sebagai simbol, tetapi juga sebagai pedoman praktis dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila memberikan arah moral dan nilai kebangsaan, sementara UUD 1945 memastikan adanya kepastian hukum serta perlindungan hak-hak warga negara. Dalam era digital, keduanya menghadapi tantangan baru berupa derasnya arus informasi, globalisasi budaya, dan potensi penyalahgunaan teknologi. Oleh karena itu, pembahasan mengenai demokrasi Indonesia tidak bisa dilepaskan dari bagaimana nilai Pancasila diinternalisasi dalam ruang digital, bagaimana konstitusi menegakkan prinsip negara hukum, serta bagaimana mekanisme kontrol sistem menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan ketertiban sosial. Dengan memahami keterkaitan ini, demokrasi Indonesia dapat terus berkembang secara substansial, beradab, dan relevan dengan dinamika zaman.

### **Landasan Ideologi dan Konstitusi**

Demokrasi di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari dua fondasi utama yang menjadi identitas bangsa, yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi, serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi tertinggi. Kedua unsur ini saling menguatkan: Pancasila menyediakan kerangka nilai, etika, dan filosofi kebangsaan, sementara UUD 1945 menyediakan kerangka hukum yang mengatur penyelenggaraan negara dan hak-hak warga negara. Di era digital, peran ganda ini menjadi semakin krusial. Ruang siber yang bersifat terbuka, cepat, dan tanpa batas geografis berpotensi melemahkan kohesi sosial jika tidak diimbangi dengan pedoman moral dan aturan hukum yang jelas. Tanpa landasan ideologi yang kuat, kebebasan berekspresi di media digital mudah berubah menjadi anarki informasi, ujaran kebencian, dan polarisasi identitas. Sebaliknya, tanpa konstitusi yang ditegakkan secara konsisten, negara kehilangan instrumen untuk melindungi warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan maupun kejahatan siber.

Oleh karena itu, memahami bagaimana nilai-nilai Pancasila diinternalisasi dalam praktik demokrasi, serta bagaimana konstitusi berfungsi sebagai pengendali sistem di ruang digital, menjadi langkah awal untuk menjaga demokrasi Indonesia tetap substansial dan beradab. Pembahasan berikut akan menguraikan tiga aspek utama: penguatan nilai Pancasila dalam demokrasi digital, fondasi konstitusional yang menjamin hak dan kewajiban warga negara, serta mekanisme kontrol sistem yang menjaga keseimbangan antara kebebasan dan ketertiban.

### **Penguatan Nilai Pancasila**

Pancasila merupakan dasar negara sekaligus ideologi bangsa Indonesia yang menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga harus diwujudkan dalam praktik kehidupan sehari-hari, termasuk dalam sistem demokrasi. Demokrasi Indonesia pada hakikatnya adalah demokrasi yang berlandaskan nilai Pancasila, bukan demokrasi liberal yang sepenuhnya bebas tanpa batas. Sila pertama hingga sila kelima mengandung prinsip-prinsip penting yang relevan dengan perkembangan demokrasi di era digital. Ketuhanan Yang Maha Esa mengajarkan pentingnya moralitas dan etika dalam penggunaan teknologi. Kemanusiaan yang adil dan beradab menekankan pentingnya menghormati hak asasi manusia dalam ruang digital. Persatuan Indonesia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpecah oleh provokasi dan informasi palsu di media sosial. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan mengajarkan pentingnya dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan perbedaan pendapat. Sementara itu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menekankan pentingnya pemerataan akses teknologi dan informasi.

Aktualisasi nilai Pancasila dalam demokrasi digital menjadi tantangan besar bagi masyarakat Indonesia (Faslah, 2024). Saat ini media sosial sering digunakan sebagai sarana penyebaran ujaran kebencian, fitnah politik, dan konflik antarkelompok. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih belum memahami pentingnya etika demokrasi yang sesuai dengan nilai Pancasila. Oleh karena itu, penguatan pendidikan karakter berbasis Pancasila menjadi langkah penting agar masyarakat mampu menggunakan kebebasan digital secara bertanggung jawab. Kementerian Kominfo melaporkan, bahwa indeks literasi digital Indonesia pada 2023 berada di angka 3.65 dari skala 5, yang termasuk kategori sedang (Zahra, 2023). Angka ini menunjukkan bahwa masyarakat masih perlu penguatan pada aspek etika digital dan keamanan digital agar dapat berpartisipasi secara sehat di ruang demokrasi digital. Pancasila juga memiliki peran penting sebagai alat pemersatu bangsa di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Di era globalisasi dan digitalisasi, budaya asing dapat dengan mudah masuk dan mempengaruhi pola pikir masyarakat. Jika tidak disaring dengan baik, maka hal tersebut dapat mengikis identitas nasional dan rasa cinta tanah air. Oleh sebab itu, Pancasila harus terus dijadikan pedoman dalam membangun demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.

### **Fondasi Konstitusional**

Selain Pancasila, demokrasi Indonesia juga memiliki landasan konstitusional yang kuat melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Negara, 2001). Konstitusi berfungsi sebagai aturan dasar dalam penyelenggaraan negara dan menjadi pedoman bagi pemerintah maupun masyarakat dalam menjalankan kehidupan demokrasi. UUD 1945 menjamin berbagai hak warga negara, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, hak memperoleh pendidikan, serta hak mendapatkan perlindungan hukum. Dalam konteks era digital, jaminan konstitusi tersebut menjadi sangat penting karena masyarakat semakin aktif menyampaikan

aspirasi melalui media online. Namun kebebasan tersebut tetap harus dijalankan sesuai dengan aturan hukum dan tidak boleh melanggar hak orang lain.

Konstitusi juga mengatur prinsip negara hukum yang menempatkan hukum sebagai dasar dalam menjalankan kekuasaan negara. Artinya, semua tindakan pemerintah maupun masyarakat harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam demokrasi digital, prinsip negara hukum sangat penting untuk mengatasi berbagai permasalahan seperti penyebaran hoaks, kejahatan siber, pelanggaran privasi, hingga manipulasi informasi politik. Di sisi lain, perkembangan teknologi menuntut adanya penyesuaian kebijakan hukum agar mampu menjawab tantangan zaman. Pemerintah perlu menghadirkan regulasi yang tidak hanya melindungi kebebasan berekspresi, tetapi juga menjaga stabilitas sosial dan keamanan nasional. Regulasi tersebut harus tetap berlandaskan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, keselarasan antara Pancasila dan konstitusi menjadi fondasi penting dalam membangun demokrasi Indonesia yang kuat, adil, dan beradab di era digital.

### ***Kontrol Sistem dalam Demokrasi***

Dalam sistem demokrasi, keberadaan hukum dan lembaga negara memiliki fungsi penting sebagai alat pengendali agar demokrasi berjalan secara tertib dan stabil. Demokrasi yang terlalu bebas tanpa kontrol dapat menimbulkan konflik sosial, disinformasi, bahkan perpecahan nasional. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan yang mampu menjaga keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. Indonesia menerapkan sistem demokrasi konstitusional yang menempatkan hukum sebagai pengatur utama kehidupan negara (Rahmah & Maharani, 2025). Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Selain itu, adanya lembaga-lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi, DPR, Komisi Pemilihan Umum, dan lembaga pengawas lainnya menjadi bagian dari mekanisme kontrol demokrasi.

Di era digital, kontrol sistem menjadi semakin penting karena arus informasi bergerak sangat cepat. Informasi yang belum tentu benar dapat dengan mudah mempengaruhi opini publik dan menciptakan ketegangan politik. Oleh karena itu, pemerintah bersama masyarakat perlu membangun sistem pengawasan digital yang tetap menghormati kebebasan berekspresi namun mampu mencegah penyalahgunaan media digital. Kontrol sistem bukan berarti membatasi demokrasi, melainkan menjaga agar demokrasi tetap berjalan sesuai dengan nilai Pancasila dan konstitusi. Demokrasi yang sehat membutuhkan masyarakat yang kritis, pemerintah yang transparan, serta hukum yang ditegakkan secara adil.

### ***Demokrasi dalam Perspektif Identitas dan Kewarganegaraan***

Demokrasi Indonesia tidak hanya dipahami sebagai sistem politik, tetapi juga sebagai bagian dari identitas kebangsaan yang berakar pada Pancasila. Nilai-nilai Pancasila membentuk karakter bangsa yang membedakan Indonesia dari negara lain, sekaligus menjadi pedoman agar kebebasan politik tetap berjalan seimbang dengan tanggung jawab sosial. Dalam konteks kewarganegaraan, demokrasi menuntut setiap

warga negara untuk tidak hanya aktif berpartisipasi, tetapi juga memahami etika, hukum, dan kepentingan bersama.

Di era digital, identitas kebangsaan menghadapi tantangan serius. Media sosial sering menjadi arena konflik identitas, intoleransi, dan penyebaran ideologi yang bertentangan dengan nilai kebangsaan. Jika tidak dikendalikan, kondisi ini dapat melemahkan persatuan nasional. Oleh karena itu, penguatan identitas kebangsaan melalui nilai gotong royong, toleransi, dan persatuan menjadi sangat penting. Demokrasi Indonesia harus berorientasi pada kepentingan bersama, bukan sekadar perebutan kekuasaan, sehingga mampu menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, demokrasi dalam perspektif kewarganegaraan menuntut adanya kesadaran konstitusional. Warga negara tidak hanya memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, tetapi juga kewajiban untuk menjaga persatuan dan menghormati perbedaan. Pendidikan politik dan kewarganegaraan menjadi instrumen penting dalam membentuk masyarakat yang kritis, bertanggung jawab, dan berkomitmen terhadap nilai Pancasila. Dengan demikian, demokrasi Indonesia dapat terus berkembang sebagai sistem yang beradab, inklusif, dan sesuai dengan jati diri bangsa.

### ***Pancasila sebagai Dasar Negara dan Panduan Hidup***

Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai panduan hidup bangsa Indonesia (Faslah, 2025). Nilai-nilai Pancasila membentuk identitas nasional yang membedakan Indonesia dari negara lain. Dalam konteks demokrasi, Pancasila menjadi pedoman agar kebebasan politik tetap berjalan seimbang dengan tanggung jawab sosial dan kepentingan nasional. Di tengah perkembangan teknologi digital, identitas bangsa menghadapi tantangan yang cukup besar. Media sosial sering kali menjadi tempat munculnya konflik identitas, intoleransi, serta penyebaran ideologi yang bertentangan dengan nilai kebangsaan. Jika kondisi tersebut dibiarkan, maka dapat mengancam persatuan nasional. Oleh karena itu, penguatan identitas kebangsaan menjadi sangat penting dalam menjaga masa depan demokrasi Indonesia. Nilai gotong royong, toleransi, dan persatuan harus terus ditanamkan kepada generasi muda agar mereka tidak mudah terpengaruh oleh provokasi di dunia digital. Yang mana Pancasila juga mengajarkan bahwa demokrasi Indonesia harus berorientasi pada kepentingan bersama, bukan hanya kepentingan kelompok tertentu. Dengan demikian, demokrasi tidak hanya menjadi alat perebutan kekuasaan, tetapi juga sarana untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

### ***Geopolitik dan Kedaulatan Nasional***

Perkembangan teknologi digital membawa pengaruh global yang sangat besar terhadap kehidupan politik suatu negara. Informasi dari berbagai negara dapat masuk dengan mudah melalui internet dan media sosial. Kondisi ini menciptakan tantangan baru bagi kedaulatan nasional karena pengaruh asing dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat maupun arah kebijakan politik. Indonesia sebagai negara besar dengan keberagaman budaya harus mampu menjaga identitas nasional di tengah arus globalisasi (Alim, 2025). Demokrasi Indonesia tidak boleh kehilangan karakter kebangsaannya hanya karena mengikuti sistem atau budaya politik luar negeri. Dalam

perspektif geopolitik, demokrasi harus tetap diarahkan untuk memperkuat persatuan nasional dan menjaga stabilitas negara. Penggunaan teknologi digital perlu dimanfaatkan untuk memperkuat pendidikan kebangsaan, memperluas partisipasi masyarakat, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain itu, kedaulatan digital juga menjadi isu penting di era modern. Indonesia perlu memiliki kemampuan dalam melindungi data nasional, keamanan siber, dan informasi strategis negara. Hal ini penting agar Indonesia tidak mudah dipengaruhi oleh kepentingan asing melalui media digital. Dengan menjaga kedaulatan nasional dan identitas kebangsaan, demokrasi Indonesia akan tetap kuat dan mampu menghadapi tantangan global di masa depan.

### **Transformasi dan Partisipasi di Era Baru**

Demokrasi Indonesia terus mengalami dinamika seiring dengan perkembangan teknologi digital dan perubahan sosial masyarakat. Salah satu aspek penting dalam menjaga keberlanjutan demokrasi adalah bagaimana bangsa ini mampu bertransformasi dan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi seluruh warga negara. Transformasi yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan sistem politik, tetapi juga menyangkut pola pikir, budaya komunikasi, serta cara masyarakat berinteraksi dalam ruang publik. Era digital mempunyai peluang besar bagi partisipasi politik yang lebih inklusif, terutama melalui media sosial dan platform daring yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi secara cepat dan terbuka. Namun, peluang tersebut juga diiringi tantangan berupa maraknya disinformasi, polarisasi politik, dan lemahnya etika komunikasi. Oleh karena itu, demokrasi Indonesia membutuhkan strategi baru yang mampu menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan tanggung jawab sosial. Dalam pembahasan kali ini, generasi muda dan pendidikan politik menjadi faktor kunci. Generasi muda sebagai pengguna aktif teknologi memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan, sementara pendidikan politik dan kewarganegaraan berfungsi sebagai fondasi agar partisipasi masyarakat tetap berorientasi pada nilai Pancasila dan konstitusi. Dengan demikian, transformasi demokrasi di era baru bukan sekadar adaptasi terhadap teknologi, tetapi juga penguatan identitas kebangsaan dan kesadaran konstitusional.

### **Peran Generasi Muda**

Generasi muda punya peran penting dalam menentukan masa depan demokrasi Indonesia (Renata, 2025). Di era digital, anak muda menjadi kelompok yang paling aktif menggunakan teknologi dan media sosial. Mereka memiliki akses luas terhadap informasi serta kemampuan untuk mempengaruhi opini publik. Partisipasi generasi muda dalam demokrasi dapat dilihat dari meningkatnya keterlibatan mereka dalam diskusi politik, kampanye sosial, gerakan kemanusiaan, hingga pengawasan terhadap kebijakan pemerintah melalui media digital. Hal ini menunjukkan bahwa generasi muda memiliki kesadaran politik yang semakin berkembang. Namun di sisi lain, generasi muda juga menghadapi tantangan berupa maraknya hoaks, propaganda politik, dan budaya komunikasi yang kurang etis di media sosial. Jika tidak memiliki literasi digital yang baik, maka mereka dapat dengan mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan. Oleh karena itu, pendidikan politik dan literasi digital menjadi sangat penting bagi generasi muda. Mereka perlu dibekali kemampuan berpikir kritis, memahami konstitusi, serta menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-

hari. Dengan demikian, generasi muda dapat menjadi agen perubahan yang mampu menjaga kualitas demokrasi Indonesia. Selain itu, pemerintah dan lembaga pendidikan perlu memberikan ruang partisipasi yang lebih luas bagi generasi muda dalam proses pengambilan kebijakan. Keterlibatan mereka akan membantu menciptakan demokrasi yang lebih inklusif dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

### ***Pendidikan Politik dan Kewarganegaraan***

Pendidikan politik penting untuk membentuk masyarakat yang sadar terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara (Fadhila, 2026). Demokrasi yang baik membutuhkan warga negara yang tidak hanya aktif berpartisipasi, tetapi juga memahami etika dan aturan hukum dalam kehidupan politik. Di era digital, pendidikan kewarganegaraan tidak cukup hanya dilakukan melalui pembelajaran formal di sekolah atau kampus. Pendidikan politik juga harus dilakukan melalui media digital dengan pendekatan yang lebih kreatif dan mudah dipahami oleh masyarakat. Yang mana kini Literasi digital menjadi bagian penting dalam pendidikan politik modern. Masyarakat perlu diajarkan cara memilah informasi, mengenali berita palsu, serta memahami dampak penggunaan media sosial terhadap kehidupan demokrasi. Dengan kemampuan tersebut, masyarakat akan lebih bijak dalam menggunakan kebebasan berekspresi. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan harus mampu menanamkan semangat nasionalisme dan rasa tanggung jawab terhadap bangsa (Mustikawan et al., 2024). Demokrasi bukan hanya tentang kebebasan menyampaikan pendapat, tetapi juga tentang menjaga persatuan dan menghormati perbedaan. Melalui pendidikan politik yang baik, masyarakat Indonesia akan memiliki kesadaran konstitusional yang lebih kuat serta mampu menjaga demokrasi agar tetap berjalan sesuai dengan nilai Pancasila.

### **Kesimpulan dan Saran**

Keselarasannya antara Pancasila dan konstitusi merupakan fondasi utama dalam menjaga masa depan demokrasi Indonesia di era digital. Pancasila memberikan arah moral dan nilai kebangsaan, sedangkan konstitusi memberikan kepastian hukum dalam menjalankan kehidupan demokrasi. Keduanya harus berjalan secara harmonis agar demokrasi Indonesia tetap kuat, adil, dan sesuai dengan identitas nasional. Perkembangan teknologi digital memberikan peluang besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi lebih aktif dalam kehidupan politik. Namun di sisi lain, era digital juga menghadirkan tantangan berupa penyebaran hoaks, polarisasi politik, konflik sosial, dan ancaman terhadap kedaulatan nasional. Oleh karena itu, penguatan nilai Pancasila, penegakan konstitusi, serta peningkatan literasi digital menjadi langkah penting dalam menjaga kualitas demokrasi.

Generasi muda memiliki peran strategis dalam menentukan arah demokrasi Indonesia di masa depan. Dengan pendidikan politik dan kewarganegaraan yang baik, mereka dapat menjadi agen perubahan yang mampu menciptakan demokrasi yang lebih sehat, inklusif, dan beradab. Pada akhirnya, masa depan demokrasi Indonesia sangat bergantung pada kemampuan seluruh elemen bangsa dalam menjaga keselarasan antara kebebasan dan tanggung jawab, antara kemajuan teknologi dan

nilai kebangsaan, serta antara hak individu dan kepentingan bersama. Jika keselarasan tersebut dapat diwujudkan, maka Indonesia akan mampu menghadapi tantangan global sekaligus mempertahankan jati dirinya sebagai negara demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan konstitusi.

## Daftar Pustaka

- Alim, S. (2025). *Globalisasi dan pendidikan kewarganegaraan: Menyiapkan generasi cerdas dan toleran* (No. 1; Vol. 1). PT Afanin Media Utama. <https://repository.uin-malang.ac.id/24010/>
- Fadhila, W. (2026). *Hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/14675>.
- Faslah, R. (2024). *Identitas Nasional, geostrategi, dan geopolitik: Membangun keberlanjutan dan kedaulatan*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup. <https://repository.uin-malang.ac.id/20872/>
- Faslah, R. (2025). *Pancasila sebagai dasar negara dan panduan hidup berbangsa*. UIN Malang Press. <https://repository.uin-malang.ac.id/24376/>
- Judijanto, L. (2026). *Literasi Digital: Transformasi Teknologi Era Society 5.0*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Mustikawan, A., Ghozi, A., Hidayat, I. W., & Hidayati, F. (2024). *Evaluasi implementasi nilai moderasi beragama melalui perilaku prososial dan spirit nasionalisme pada gen z* [Research]. LP2M. <https://repository.uin-malang.ac.id/22304/>
- Negara, P. K. U.-U. D. (2001). *Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta, Indonesia: Www. Mpr. Go. Id.
- Rahmah, A., & Maharani, Y. (2025). Norma konstitusi sebagai pengendali implisit dalam sistem demokrasi. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(6), 89–95. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/17273>
- Renata, D. Z. B. (2025). Partisipasi Politik Gen Z dalam Demokrasi. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(1), 232–242.
- Zahra, N. (2023). *Meningkatkan Inklusi dalam Indeks Literasi Digital Nasional: Dari Pengukuran hingga Pemberdayaan* (0 ed.). Center for Indonesian Policy Studies. <https://doi.org/10.35497/565200>